



RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TAHUN **2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2023. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun 2023 yang memuat diantaranya yaitu tujuan, sasaran dan target capaian kinerja yang akan di capai pada Tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua unit kerja berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 secara konsisten. Selanjutnya, diharapkan dengan adanya dokumen Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dapat memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja perencanaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Akhir kata, dokumen Renja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 ini disusun dengan sebaik-baiknya dan semoga dapat menghasilkan perencanaan yang implementatif guna mendukung terwujudnya “Kejayaan Inhil Yang Semakin Maju, Bermarwah Dan Bermartabat”.

Tembilahan, September 2022

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711130 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika dan Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.....	27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.....	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	57
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	58
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	58
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	60
3.3 Program dan Kegiatan	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	71
BAB V PENUTUP	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Indragiri Hilir.....	10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	25
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hilir.....	35
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	61
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	73

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah dalam periode lima tahunan maupun jangka pendek dalam periode tahunan. Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan dan subkegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan berfungsi untuk menterjemahkan rencana strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada arahan kebijakan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dan Renstra Bappeda Tahun 2018 - 2023 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda. Kemudian, Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyusun dokumen Renja untuk mewujudkan formulasi perencanaan pembangunan yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

yaitu sebagai acuan dan tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 yang sesuai tugas, pokok, dan fungsi.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk :

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Renja tahun 2021 dan Renstra hingga tahun 2022;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023.

1.4. Sistematika Penyusunan

Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3	Program dan Kegiatan dan Subkegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

Dalam proses penyusunan Renja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 agar terjadi kesinambungan program dan kegiatan dalam hal pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2021, kemudian dikaitkan dengan pencapaian Renstra. Pada tahun 2021, Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan sebanyak 4 program dengan rencana anggaran senilai Rp. 10.243.180.096 (sepuluh milyar dua ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu Sembilan puluh enam rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 8.450.039.770 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) atau realisasi kinerja sebesar 99,44% dan keuangan sebesar 82,49%.

Secara rinci, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dan pencapaian renstra s/d tahun 2022 tersaji dalam tabel 2.1. berikut,

TABEL 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2022	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 8/7*100)	(10)	(11 = 6 + 8 + 10)	(12 = 11/5*100)
	MENINGKATKAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. INHIL	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prediket	BB		B	C		B		
	<i>Meningkatnya tata kelola Organisasi Bappeda yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.</i>	<i>Nilai evaluasi RB Bappeda atas komponen pengungkit</i>	<i>Nilai</i>	28		20	16,65	83,25	25	41,65	148,75
		Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prediket	BB (70,05)		70,02	B (64,12)	91,57	B (68,50)	132,62	189,32
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks	100		n/a	n/a	n/a	100		

	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan										
5.1.1.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100		95	0	0	100	100	100,00
5.1.1.2.01	1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	Persen	100		100	100	100	100	100	100,00
5.1.1.2.01.1	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16		6	6	100	5	11	68,75
5.1.1.2.01.6	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	9		3	3	100	3	6	66,67
5.1.1.2.02	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persen	100		100	100	100	100	100	100,00
5.1.1.2.02.1	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	143		45	45	100	49	94	65,73
5.1.1.2.02.5	1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3		1	1	100	1	2	66,67
5.1.1.2.03	1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100		100	100	100	100	100	100,00

		Yang Terpenuhi										
5.1.1.2.03.2	1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Orang	13		5	4	80	4	8	61,54
5.1.1.2.05	1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persen	100		100	100	100	100	100	100,00
5.1.1.2.05.2	1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1		0	0	-	1	1	100,00
5.1.1.2.05.9	1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	48		8	5	62,5	23	28	58,33
5.1.1.2.06	1.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persen	100		100	100	100	100	200	200,00
5.1.1.2.06.1	1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6		2	2	100	2	4	66,67
5.1.1.2.06.2	1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	36		24	24	100	6	30	83,33
5.1.1.2.06.4	1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10		3	3	100	3	6	60,00
5.1.1.2.06.5	1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15		9	9	100	3	12	80,00

5.1.1.2.06.6	1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	77		17	17	100	30	47	61,04
5.1.1.2.06.9	1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	367		162	154	95	110	264	71,93
5.1.1.2.06.11	1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	8		0	0	0	0	0	0,00
5.1.1.2.07	1.6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang disediakan	Unit	2		0	0	0	0	0	0,00
5.1.1.2.07.1	1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2		0	0	0	0	0	0,00
5.1.1.2.08	1.7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Persen	100		100	100	100	100	100	100,00
5.1.1.2.08.1	1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4		2	2	100	1	3	75,00
5.1.1.2.08.2	1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	112		7	7	100	57	64	57,14
5.1.1.2.08.4	1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	115		9	9	100	60	69	60,00

5.1.1.2.09	1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	Persen	100		100	100	100	100	100	100,00
5.1.1.2.09.2	1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	142		60	41	68	41	82	57,75
5.1.1.2.09.7	1.8.2 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	3		1	1	100	1	2	66,67
5.1.1.2.09.11	1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	677		1	1	100	338	339	50,07
	MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG SELARAS, PARTISIPATIF DAN KOORDINATIF	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target $\geq 76\%$	Persen	100				0	100	100	100,00
	<i>Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Daerah</i>	<i>Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKP</i>	Persen	100				0	100	100	100,00
								0		0	0,00
5.1.2	2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKP	Persen	100		0	0	0	100	100	100,00
5.1.2.2.01	2.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	Dokumen	11		2	2	100	6	8	72,73

5.1.2.2.01.1	2.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	4		1	1	100	0	1	25,00
5.1.2.2.01.3	2.1.2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1		0	0	0	0	0	0,00
5.1.2.2.01.4	2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pertemuan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik yang terlaksana	Kali	0		1	1	100	1	2	0,00
5.1.2.2.01.4	2.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah	Berita Acara	54		0	0	0	0	0	0,00
5.1.2.2.01.5	2.1.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	3		1	1	100	1	2	66,67
5.1.2.2.01.7	2.1.6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	9		2	2	100	5	7	77,78
5.1.2.2.02	2.2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD sesuai Standar	Persen	100		100	100	100	100	100	100,00

5.1.2.2.02.2	2.2.1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	8		1	1	100	4	5	62,50
5.1.2.2.03	2.3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)	Persen	100		100	100	100	100	200	200,00
5.1.2.2.03.1	2.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	79		75	38	51	2	40	50,63
5.1.2.2.03.3	2.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	13		5	5	100	4	9	69,23
		<i>Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berkualitas Baik</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>
5.1.3	3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA RKPd dan RENJA)	Persen	100		100	100	100	100	100	100,00

5.1.3.2.01	3.1. Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan manusia	Persen	100		100	100	100	100	100	100,00
5.1.3.2.01.1	3.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	7		1	1	100	3	4	57,14
5.1.3.2.01.3	3.1.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	1		1	1	100	1	2	100,00
5.1.3.2.01.4	3.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Dokumen	35		33	29	87,88	1	30	85,71
5.1.3.2.01.5	3.1.4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	46		40	32	80,00	3	35	76,09

5.1.3.2.01.7	3.1.5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	4		1	1	100	1	2	50,00
5.1.3.2.01.8	3.1.6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	37		33	53	161	1	54	145,95
5.1.3.2.02	3.2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	100		100	100	100	100	100	100,00
5.1.3.2.02.1	3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	44		40	40	100	1	41	93,18
5.1.3.2.02.5	3.2.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	44		38	40	105	1	41	93,18

5.1.3.2.03	3.3. Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Bidang dan	Cakupan Pelaksanaan koordinas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100		100	100	100	100	100	100,00
5.1.3.2.03.4	3.3.1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	114		50	57	114	32	89	78,07
5.1.3.2.03.8	3.3.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	105		43	44	102	31	75	71,43
	MENGEMBANGKAN JARINGAN INOVASI DAERAH MELALUI PEMANFAATAN KELITBANGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Produk inovasi Daerah hasil dari kelitbangan yang implementasikan	Persen	100		100	100	100	100	100	100,00
	<i>Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan Daerah</i>		<i>Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan Daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>90</i>		90	90	100	80	86,67	96,30
5.5.2	4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	90		90	90	100	80	90	90,00
5.5.2.2.01	4.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Cakupan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	Persen	90		90	90	100	80	90	90,00

5.5.2.2.01.1	4.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	2		0	0	0	1	1	50,00
5.5.2.2.01.12	4.1.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	73		71	51	71,83	1	52	71,23
5.5.2.2.01.13	4.1.3	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	2		0	0	0	1	1	50,00
5.05.02.02.03	4.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan pendukung perencanaan pembangunan daerah	Persen	72,57		40	40	100	1	41	56,50
5.05.02.02.03.04	4.2.1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah koordinasi rumusan kajian dan pengembangan produk unggulan daerah yang dilakukan	Kali	37,57		6	4	67	0	4	10,65
5.5.2.2.04	4.3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100		100	100	100	100	100	100,00
5.5.2.2.04.1	4.3.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	3		1	1	100	1	2	66,67

		Teknologi dan Inovasi										
5.5.2.2.04.3	4.3.2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	3		1	1	100	1	2	66,67
5.5.2.2.04.4	4.3.3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Laporan	9		3	3	100	3	6	66,67

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut, hasil pencapaian target kinerja Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian target Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi terhadap Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021
 - a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 telah dilaksanakan 4 program, 16 kegiatan dan 40 sub kegiatan.
 - b. Dari 4 program yang dilaksanakan dengan tingkat realisasi dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, bahkan ada 1 program yang melebihi target. Adapun program dengan tingkat realisasi dapat memenuhi target dan yang melebihi target dari yang di ditetapkan yaitu :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana tingkat realisasi program ini mencapai 100% melebihi dari yang ditargetkan sebesar 95%;
 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dimana tingkat realisasi sebesar 100% sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 100%;
 3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tingkat realisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%;

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan tingkat realisasi 90% mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%;
2. Hasil evaluasi terhadap perkiraan capaian target Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022.
 - a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 terdapat 4 program, 15 kegiatan dan 41 subkegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. Dari 4 program, 15 kegiatan dan 41 subkegiatan tersebut dipastikan dapat dilaksanakan seluruhnya dan dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang

- Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tabel 2.2. berikut disajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Satuan	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun* 2022	Tahun** 2023	Tahun*** 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)				(8)
1	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target $\geq 76\%$	Persen	-	-	100	100	100	100	n/a	100	100	100	Sesuai Target
2	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai Target
3	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berkualitas Baik	Persen	-	-	100	100	100	100	85	n/a	100	100	Dibawah Target
4	Persentase Produk inovasi Daerah hasil dari kelitbangan yang implementasikan	Persen	-	-	100	100	100	100	87	n/a	100	100	Dibawah Target
5	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan Daerah	Persen	-	-	80	80	90	100	70	n/a	100	100	Dibawah Target
6	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prediket	-	-	B (65,00)	B (65,00)	B (68,00)	BB (71,00)	C (45,87)	B (62,56)	B (68,00)	BB (71,00)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Bappeda Dibawah Target
7	Nilai evaluasi RB Bappeda atas komponen pengungkit	Nilai	-	-	20	25	28	30	16,65	22,71	28	30	Nilai evaluasi RB Bappeda atas komponen pengungkit Dibawah Target

8	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prediket	-	-		B (68,50)	BB (70,05)	BB (72,50)	B (64,12)	n/a	BB (70,05)	BB (72,50)	Nilai AKIP Bappeda Dibawah Target
9	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks	-	-	0	100	100	100	n/a	n/a	100	100	IKM Bappeda Belum Dilakukan Penilaian
10	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Persen	-	-	0	100	0	100	0	100	0	100	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Sesuai Target
11	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Sesuai Target

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari isu-isu yang terjadi, baik isu yang terjadi dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsinya, maupun isu-isu yang berkembang dari eksternal. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya pemahaman OPD dalam hal perencanaan kinerja maupun anggaran, serta pengakomodiran regulasi yang turun di pertengahan periode penyusunan dokumen perencanaan dapat menyebabkan tidak optimalnya konsistensi perencanaan antar waktu, sehingga seringkali harus dilaksanakan perubahan pada dokumen operasionalnya;
2. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga pengambilan kebijakan berdasarkan data menjadi terhambat;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan ketidaksinkronan antara target 5

tahunan dengan target tahunan pada dokumen perencanaan OPD sehingga evaluasi belum menjadi dasar penyusunan perencanaan pada periode selanjutnya.

Namun demikian perumusan perencanaan pembangunan telah diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, selaras dengan program nasional sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Selain itu, dalam meningkatkan kinerja pelayanannya, Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi tantangan meliputi :

1. Pengelolaan data/informasi Pengelolaan data dimaksudkan agar data dan informasi yang diperlukan segera dapat ditemukan dengan sajian yang informatif komunikatif dan sederhana. Pengelolaan data seperti ini bertujuan agar pengguna data memiliki kemudahan dalam mengakses data/informasi yang dibutuhkan. Penilaian tentang pengelolaan adalah sampai dengan tersajinya data/informasi secara cepat, mudah dan komunikatif berbasis TI. Sebagian besar data di Bappeda masih tersebar di bidang pengampu kegiatan dan belum mencapai taraf memudahkan penyajian dalam waktu yang singkat;
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan dokumen perencanaan dimaksudkan untuk menyediakan acuan kerja pembangunan bagi seluruh dinas/instansi selama kurun waktu tertentu, dengan menggunakan data/informasi beserta analisisnya

serta melalui proses yang tepat. Tujuan penyusunan dokumen-Dokumen tersebut adalah untuk mengarahkan keseluruhan gerak langkah pembangunan agar berjalan dengan irama yang sama sesuai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan. Tugas penyusunan dokumen rencana pembangunan adalah merupakan pekerjaan inti dari ketugasan Bappeda. Dalam menyusun perencanaan pada periode lalu telah dibangun sistem perencanaan dan telah dapat berfungsi dengan baik, namun demikian sistem tersebut belum dapat menjawab kebutuhan akan sistem yang terintegrasi dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan. Masih rendahnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap arti pentingnya dokumen perencanaan pembangunan daerah;

3. Pengendalian Perencanaan Tugas koordinasi, monitoring, dan evaluasi implementasi rencana dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana rencana dapat berjalan serta mengetahui hasil (outcome) dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Pada tataran paling akhir adalah mengevaluasi temuan dalam pelaksanaan untuk mendapatkan umpan balik dalam penyempurnaan dokumen

perencanaan. Keberhasilan pengendalian diawali dari rumusan rencana yang benar, pelaksanaan yang taat asas dan komitmen terhadap rencana yang telah dirumuskan. Tantangan yang harus dijawab tingkat kedisiplinan PD dalam melakukan pengendalian dengan rumusan indicator, cara pengukuran, dan mekanisme pengumpulan datanya;

4. Pelaporan Hasil Implementasi Perencanaan Tugas pelaporan hasil implementasi perencanaan dimaksudkan untuk dapat menyajikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengkaji kemungkinan terjadinya kekurangan dan kelebihan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pelaporan hasil implementasi perencanaan ini masih perlu pembangunan komitmen yang lebih kuat, agar pelaporan dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu.

Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir juga memiliki peluang dalam melaksanakan tugasnya yaitu dengan :

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda;
2. Berkembangnya teknologi informasi & komputerisasi untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan perencanaan pembangunan daerah;
3. Tingginya apresiasi pihak ketiga, baik swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk melakukan kajian, penelitian sebagai referensi dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah;

4. Cukup banyak terbuka lembaga pendidikan dan bimbingan teknis yang berorientasi penguatan perencanaan yang dapat diikuti oleh aparatur Bappeda;
5. Dukungan pengambil kebijakan di atas cukup tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diformulasikan isu-isu strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan dan kegiatan prioritas Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappeda

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi.

2. Optimalisasi hasil penelitian dan kajian sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan. Perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan hasil kajian penelitian dan pengembangan, diantaranya dengan melakukan publikasi dan sosialisasi, agar hasil kajian dan penelitian tersebut dapat menjadibahkan dalam perumusan kebijakan pembangunan serta penyusunan dokumen perencanaan, sehingga nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah dijabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah, memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah dijabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

4. Peningkatan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan

Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun lalu harus dijadikan acuan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya karena dengan proses evaluasi kita dapat melihat dan menganalisis sejauh mana program dan kegiatan itu dapat menjawab permasalahan pembangunan yang ada dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Rancangan awal RKPD tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 termasuk Bappeda. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD ini, Bappeda harus melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh Bappeda. Adapun proses

telaahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Bappeda yang tercantum di dalam RKPD 2023;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Bappeda berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Bappeda yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan di Bappeda yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Bappeda yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Melakukan pemetaan program dan kegiatan yang ada pada Rancangan Awal Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Membuat rumusan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda hasil review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang

dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan/sub kegiatan;

8. Mengidentifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, secara umum memang terdapat penyesuaian target capaian dan kebutuhan dana pada program, kegiatan dan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir karena hasil telaahan bersama dan efisiensi kegiatan serta jumlah anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023. Untuk lebih rinci, disajikan dalam Tabel 2.3. sebagai berikut,

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Rancangan Awal RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN						
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	7.911.040	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	8.778.165	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	Dokumen	8	191.580	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	Dokumen	8	148.969	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	74.190	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	59.478	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	117.390	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	89.491	

							i Kinerja SKPD						
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persen	100	5.730.180	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persen	100	5.824.849
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	49	5.640.780	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	49	5.729.852
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	89.400	1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	94.997
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persen	100	89.400	1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persen	100	62.400

1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Orang	4	89.400	1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Orang	4	62.400
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persen	100	184.670	1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persen	100	175.784
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	17	184.670	1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	17	175.784
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persen	100	1.088.110	1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persen	100	1.736.794
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	50.050	1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	21.600

			Kelurahan						angan Bangunan Kantor	, Semua Kelurahan						
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	6	178.740		1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	6	336.578
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	4	120.000		1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	4	128.883
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	3	38.840		1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	3	38.750

1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	30	25.000	1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	30	30.000
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	583.370	1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	1.151.687
1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	8	92.110	1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	8	29.296

							nik pada SKPD	a Kelurahan					
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang disediakan	Unit	2	50.000	1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang disediakan	Unit	2	73.780	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	50.000	1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	73.780	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Persen	100	239.200	1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Persen	100	364.185	

1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.000	1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	6.000
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	168.600	1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	208.320
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	46	65.600	1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	46	149.865

1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	Persen	100	337.900	1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	Persen	100	453.805
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	41	129.400	1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	41	139.065
1.8.2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	24.500	1.8.2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	21.000

1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	338	184.000	1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	338	293.740
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	1.190.000	2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	1.590.000
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	Dokumen	3	933.810	2.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	Dokumen	3	1.248.411
2.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	3	362.920	2.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	3	483.895

								is Pemba nguna n Daerah	Kelur ahan						
2.1.2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Indragir i Hilir, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	Jumlah Acara Publik	Berita Konsultasi	Berita Acara	1	12.110	2.1.2	Pelaks anaan Konsul tasi Publik	Kab. Indra giri Hilir, Semu a Keca matan , Semu a Kelur ahan	Jumlah Acara Konsultasi Publik	Berita	Berita Acara	1	16.140
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Indragir i Hilir, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	Jumlah Acara Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Forum	Berita Acara	54	2.850	2.1.3	Koordi nasi Pelaks anaan Forum Perang kat Daerah /Linta s Perang kat Daerah	Kab. Indra giri Hilir, Semu a Keca matan , Semu a Kelur ahan	Jumlah Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita	Berita Acara	54	3.800
2.1.4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Indragir i Hilir, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	Jumlah Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita	Berita Acara	1	117.270	2.1.4	Pelaks anaan Musre nbang Kabup aten/K ota	Kab. Indra giri Hilir, Semu a Keca matan , Semu	Jumlah Acara Musrenbang Kabupaten/Kot a	Berita	Berita Acara	1	156.358

2.1.5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Dokumen	2	438.660	2.1.5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ /RKPD)	Dokumen	2	588.218	
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD sesuai Standar	Persen	100	80.360	2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD sesuai Standar	Persen	100	107.147	
2.2.1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	3	80.360	2.2.1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	3	107.147	

		Kelurahan					Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	matan, Semua Kelurahan					
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)	Persen	100	175.830	2. Pengendalian, 3. Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)	Persen	100	234.442	
2.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	71.610	2.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	95.480	

	2.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	104.220		2.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	138.962
	3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA RKPd dan RENJA)	Persen	100	2.179.780		3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA RKPd dan RENJA)	Persen	100	3.263.784
	3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Cakupan Pelaksana Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan manusia	Persen	100	860.000		3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Cakupan Pelaksana Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan manusia	Persen	100	1.250.000

3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	144.960	3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	204.955
3.1.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	84.120	3.1.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	160.825

3.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	133.610	3.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	183.613
3.1.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	121.670	3.1.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	184.971

3.1.5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	2	106.010	3.1.5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	2	186.005
3.1.6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	3	269.630	3.1.6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	3	329.632

							Manusia						
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	100	759.780	3. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	100	1.103.785	
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	399.780	3.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	569.284	

							D dan RKPD)						
3.2.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	360.000	3.2.2 Koordi nasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	534.500	
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Cakupan Pelaksanaan koordinas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100	560.000	3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Cakupan Pelaksanaan koordinas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100	910.000	

3.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	32	368.350	3.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	32	626.057
3.3.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	31	191.650	3.3.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	31	283.943
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	90	1.060.000	4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	90	1.200.000

4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Cakupan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	Persen	90	464.200	4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Cakupan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	Persen	90	564.010
4.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	114.200	4.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	164.010
4.1.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	100.000	4.1.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	183.500

4.1.3	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	250.000	4.1.3	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	216.500
4.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	595.800	4.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	635.990
4.2.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	123.770	4.2.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	209.358

	4.2.2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	246.230	4.2.2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	190.642
	4.2.3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	3	225.800	4.2.3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	3	235.990
							12.340.820							14.831.949

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara umum, aspirasi dan usulan dari masyarakat diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, namun Bappeda juga memiliki tanggung jawab dalam mengorganisasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait. Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah juga tidak terdapat usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi maupun dari pelaksanaan reses oleh Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

P erencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan tema “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” melalui pemulihandaya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Tema tersebut dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen RKP tahun 2023 telah ditetapkan Sasaran dan Arah Kebijakan dan Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Adapun Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan

Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain memperhatikan tema pembangunan dan prioritas nasional juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan tema pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 yang disejalankan dengan Tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2023 adalah **“Penguatan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Dan Optimalisasi Pelayanan Publik Untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Dalam Menjaga Marwah Dan Martabat Indragiri Hilir”**. Sasaran dan target yang akan dicapai pada tahun 2023 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 4,78%
2. Tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 5,59%
3. IPM diproyeksikan sebesar 67,92
4. Gini ratio diproyeksikan sebesar 0,28 dan
5. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 2,51%.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Agar keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan dapat terjaga, maka dalam perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif.
2. Mengembangkan jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhil.

Sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Daerah.
2. Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan Daerah.
4. Meningkatnya tata kelola Organisasi Bappeda yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
				Realisasi			Target	
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target $\geq 76\%$	Persen	100	100	100	100	100
1.1	Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100
1.2	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berkualitas Baik	Persen	75	82	85	100	100
2.	Mengembangkan jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Produk inovasi Daerah hasil dari kelitbangan yang implementasikan	Persen	n/a	65	87	100	100
2.1	Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan Daerah	Persen	50	60	70	80	90
3.	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhil	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prediket	n/a	n/a	C (45,87)	B (65,00)	B (68,00)

3.1	Meningkatnya tata kelola Organisasi Bappeda yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Nilai evaluasi RB Bappeda atas komponen pengungkit	Nilai	n/a	n/a	16,65	25	28
		Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prediket	CC (54,07)	B (61.05)	B (64,12)	B (68,50)	BB (70.05)
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks	n/a	n/a	n/a	100	100

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pencapaian visi Bupati Indragiri Hilir yaitu **“Kejayaan Inhil yang Semakin Maju, Bermarwah, dan Bermartabat”**. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, terdapat 8 misi yang terdiri atas :
 - a. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif, dan berketepatan hukum;
 - b. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah;
 - c. Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat;
 - d. Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan iman dan taqwa;
 - e. Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
 - f. Memantapkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban;
 - g. Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran;
 - h. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi daerah.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka Bappeda menjabarkan dan mengoperasionalkannya dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional maupun global seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, maka Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir telah membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs setiap tahunnya. Penyusunan Rencana

Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Kabupaten Indragiri Hilir ini sebagai perwujudan peranan aktif dalam pencapaian sasaran-sasaran global sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pemerataan pembangunan dan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang dan wilayah di Indragiri Hilir.

4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir dapat diwujudkan dengan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Sinergitas perencanaan ekonomi dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Pengembangan daerah terisolir

Pengembangan daerah terisolir juga menjadi pertimbangan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan dengan sebagian daerah masih terisolir. Dengan adanya program penelitian dan pengembangan daerah dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat, LSM, maupun Perguruan Tinggi untuk melakukan penelitian, pengembangan maupun perekayasaan yang salah satunya berguna untuk pengembangan daerah terisolir.

3.3.2. Uraian Garis Besar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja ini, maka akan dituangkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir akan melaksanakan 4 program, 16 kegiatan, dan 44 sub kegiatan, antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp 7.911.040.000,00
Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	191.580.000,00
✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	74.190.000,00
✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	117.390.000,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	5.730.180.000,00
✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	5.640.780.000,00
✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	89.400.000,00
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	89.400.000,00
✓ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	89.400.000,00
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	184.670.000,00
✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	184.670.000,00
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1.088.110.000,00
✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	50.050.000,00
✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	178.740.000,00
✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	120.000.000,00
✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	38.840.000,00

✓	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	25.000.000,00
✓	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	583.370.000,00
✓	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	92.110.000,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	50.000.000,00
✓	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	50.000.000,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	239.200.000,00
✓	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5.000.000,00
✓	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	168.600.000,00
✓	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	65.600.000,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	337.900.000,00
✓	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	129.400.000,00
✓	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp	24.500.000,00
✓	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	184.000.000,00
b.	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	1.190.000.000,00

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp	933.810.000,00
✓ Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp	362.920.000,00
✓ Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp	12.110.000,00
✓ Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp	2.850.000,00
✓ Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp	117.270.000,00
✓ Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	438.660.000,00
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	80.360.000,00
✓ Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp	80.360.000,00
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	175.830.000,00
✓ Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp	71.610.000,00
✓ Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp	104.220.000,00

- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Rp 2.179.780.000,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Rp 860.000.000,00
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- ✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Rp 144.960.000,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
 - ✓ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rp 84.120.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Rp 133.610.000,00
dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan
 - ✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Rp 121.670.000,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan Manusia
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - ✓ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rp 106.010.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pembangunan Manusia
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Rp 269.630.000,00
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Rp 759.780.000,00
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya
Alam)

- ✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp 399.780.000,00
- ✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp 360.000.000,00
- 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Rp 560.000.000,00
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rp 368.350.000,00
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Rp 191.650.000,00
- d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp 1.060.000.000,00
 - 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Rp 464.200.000,00
 - ✓ Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Rp 114.200.000,00
 - ✓ Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Rp 100.000.000,00

✓	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Rp	250.000.000,00
2.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp	595.800.000,00
✓	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp	123.770.000,00
✓	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Rp	246.230.000,00
✓	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rp	225.800.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator, target, dan pagu yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2023. Untuk merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut, terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Mempelajari RKP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 serta Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Keserasian dan kesinambungan pembangunan baik dari sisi perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Ketersediaan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

5. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun harus menjawab dan merespon isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dan prioritas nasional yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 disajikan pada tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN									
5.1										
5.1.1.	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen		100	8.778.164.774			100 Persen	8.735.343.789
5.1.1.2.01	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	Dokumen		8	148.969.050			8 Dokumen	64.619.800
5.1.1.2.01.1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	59.477.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	39.377.800

5.1.1.2.01.6	1 Koordinasi dan Penyusunan · Laporan Capaian Kinerja dan 1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD · 2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	89.491.250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Laporan	25.242.000
5.1.1.2.02	1 Administrasi Keuangan · Perangkat Daerah 2	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persen		100	5.824.849.074		100 Persen	6.086.313.939
5.1.1.2.02.1	1 Penyediaan Gaji dan · Tunjangan ASN 2 · 1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49	5.729.852.374	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	49 Orang 14 Bulan	5.991.717.239
5.1.1.2.02.5	1 Koordinasi dan Penyusunan · Laporan Keuangan Akhir 2 Tahun SKPD · 2	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	94.996.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	94.596.700
5.1.1.2.05	1 Administrasi Kepegawaian · Perangkat Daerah 3	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persen		100	175.783.550		100 Persen	175.783.550
5.1.1.2.05.9	1 Pendidikan dan Pelatihan · Pegawai Berdasarkan Tugas 3 dan Fungsi · 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17	175.783.550	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	17 Orang	175.783.550
5.1.1.2.06	1 Administrasi Umum Perangkat · Daerah 4	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persen		100	1.736.793.800		100 Persen	1.544.982.000

5.1.1.2.06.1	1 . 4 . 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	21.599.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Paket	23.000.000
5.1.1.2.06.2	1 . 4 . 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6	336.578.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Paket	300.000.000
5.1.1.2.06.4	1 . 4 . 3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	128.883.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Paket	127.982.000
5.1.1.2.06.5	1 . 4 . 4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	38.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Paket	35.000.000
5.1.1.2.06.6	1 . 4 . 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30 Dokumen	30.000.000

5.1.1.2.06.9	1 Penyelenggaraan Rapat . Koordinasi dan Konsultasi 4 SKPD . . 6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110	1.151.687.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	110 Laporan	1.000.000.000
5.1.1.2.06.1 1	1 Dukungan Pelaksanaan Sistem . Pemerintahan Berbasis 4 Elektronik pada SKPD . . 7	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8	29.296.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 Dokumen	29.000.000
5.1.1.2.07	1 Pengadaan Barang Milik Daerah . Penunjang Urusan Pemerintah 5 Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang disediakan	Unit		2	73.780.000		2 Unit	73.780.000
5.1.1.2.07.1	1 Pengadaan Kendaraan . Perorangan Dinas atau 5 Kendaraan Dinas Jabatan . . 1	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	73.780.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	73.780.000
5.1.1.2.08	1 Penyediaan Jasa Penunjang . Urusan Pemerintahan Daerah 6	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Persen		100	364.184.500		100 Persen	395.864.500
5.1.1.2.08.1	1 Penyediaan Jasa Surat . Menyurat 6 . . 1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	6.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	6.000.000

5.1.1.2.08.2	1 . 6 . 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48	208.320.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	48 Laporan	200.000.000
5.1.1.2.08.4	1 . 6 . 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46	149.864.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	46 Laporan	189.864.500
5.1.1.2.09	1 . 7 .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	Persen		100	453.804.800		100 Persen	394.000.000
5.1.1.2.09.2	1 . 7 . 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41	139.064.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	41 Unit	120.000.000
5.1.1.2.09.7	1 . 7 . 2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	21.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Unit	24.000.000
5.1.1.2.09.1 1	1 . 7 . 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	338	293.740.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	338 Unit	250.000.000

5.1.2	2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen		100	1.589.999.800		100 Persen	1.795.301.070
5.1.2.2.01		2 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	Dokumen		3	1.248.410.900		3 Dokumen	1.324.870.750
5.1.2.2.01.1		2 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	483.895.250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	503.895.250
5.1.2.2.01.3		2 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	16.139.850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Berita Acara	40.400.000
5.1.2.2.01.4		2 Koordinasi Pelaksanaan Forum Daerah/Lintas Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah	Berita Acara	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54	3.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	54 Berita Acara	50.913.500
5.1.2.2.01.5		2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	156.358.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Berita Acara	262.337.000
5.1.2.2.01.7		2 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan	2	588.217.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	467.325.000

				, Semua Kelurahan						
5.1.2.2.02	2 Analisis Data dan Informasi . Pemerintahan Daerah Bidang 2 Perencanaan Pembangunan . Daerah	Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD sesuai Standar	Persen		100	107.146.900			100 Persen	89.717.520
5.1.2.2.02.2	2 Pembinaan dan Pemanfaatan . Data dan Informasi 2 Perencanaan Pembangunan . Perangkat Daerah 1	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	107.146.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 Orang	89.717.520
5.1.2.2.03	2 Pengendalian, Evaluasi dan . Pelaporan Bidang Perencanaan 3 Pembangunan Daerah .	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)	Persen		100	234.442.000			100 Persen	380.712.800
5.1.2.2.03.1	2 Koordinasi Pengendalian . Perencanaan dan Pelaksanaan 3 Pembangunan Daerah di . Kabupaten/Kota 1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	95.480.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 Laporan	302.110.050
5.1.2.2.03.3	2 Monitoring, Evaluasi dan . Penyusunan Laporan Berkala 3 Pelaksanaan Pembangunan . Daerah 2	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	138.962.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 Laporan	78.602.750
5.1.3	3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah	Persen		100	3.263.784.397			100 Persen	3.030.000.000

		(RPJPD, RPJMD,RENSTRA RKPD dan RENJA)								
5.1.3.2.01	3 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	Persen		100	1.249.999.850			100 Persen	1.130.000.000
5.1.3.2.01.1	3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	204.955.250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	200.000.000
5.1.3.2.01.3	3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	160.824.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	150.000.000
5.1.3.2.01.4	3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	183.612.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	160.000.000
5.1.3.2.01.5	3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	184.970.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	160.000.000
5.1.3.2.01.7	3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan	2	186.005.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Laporan	160.000.000

5.1.3.2.01.8	3 Koordinasi Pelaksanaan · Sinergitas dan Harmonisasi 1 Perencanaan Pembangunan · Daerah Bidang Pembangunan 6 Manusia	Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	, Semua Kelurahan Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	3	329.631.550	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Laporan	300.000.000
5.1.3.2.02	3 Koordinasi Perencanaan Bidang · Perekonomian dan SDA (Sumber 2 Daya Alam)	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen		100	1.103.784.547		100 Persen	1.000.000.000
5.1.3.2.02.1	3 Koordinasi Penyusunan · Dokumen Perencanaan 2 Pembangunan Daerah Bidang · Perekonomian (RPJPD, RPJMD 1 dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	3	569.284.301	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	500.000.000
5.1.3.2.02.5	3 Koordinasi Penyusunan · Dokumen Perencanaan 2 Pembangunan Daerah Bidang · SDA (RPJPD, RPJMD dan 2 RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	5	534.500.246	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	500.000.000
5.1.3.2.03	3 Koordinasi Perencanaan Bidang · Infrastruktur dan Kewilayahan 3	Cakupan Pelaksanaan koordinas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persen		100	910.000.000		100 Persen	900.000.000
5.1.3.2.03.4	3 Koordinasi Pelaksanaan · Sinergitas dan Harmonisasi 3 Perencanaan Pembangunan · Daerah Bidang Infrastruktur 1	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	32	626.057.300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	32 Laporan	650.000.000

5.1.3.2.03.8	3 Koordinasi Pelaksanaan · Sinergitas dan Harmonisasi 3 Perencanaan Pembangunan · Daerah Bidang Kewilayahan 2	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31	283.942.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	31 Laporan	250.000.000
5.5.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.5.2	4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen		90	1.200.000.000		90 Persen	1.020.000.000
5.5.2.2.01	4 Penelitian dan Pengembangan · Bidang Penyelenggaraan 1 Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	Persen		90	564.010.350		90 Persen	480.000.000
5.5.2.2.01.1	4 Fasilitasi, Pelaksanaan dan · Evaluasi Penelitian dan 1 Pengembangan Bidang · Penyelenggaraan Otonomi 1 Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	164.010.350	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	150.000.000
5.5.2.2.01.1 2	4 Pengelolaan Data Kelitbangan · dan Peraturan 1 · 2	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	183.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	150.000.000
5.5.2.2.01.1 3	4 Perumusan Rekomendasi atas · Rencana Penetapan Peraturan 1 Baru dan/atau Evaluasi · Terhadap Pelaksanaan 3 Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	216.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Rekomendasi	180.000.000
5.5.2.2.04	4 Pengembangan Inovasi dan · Teknologi 2	Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen		100	635.989.650		100 Persen	540.000.000

5.5.2.2.04.1	4 . 2 . 1	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	209.358.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	170.000.000	
5.5.2.2.04.3	4 . 2 . 2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	190.641.650	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	170.000.000	
5.5.2.2.04.4	4 . 2 . 3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	235.989.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Laporan	200.000.000	
TOTAL								14.831.948.971			14.580.644.859

BAB V PENUTUP

Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta indikator, target kinerja, dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam waktu satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

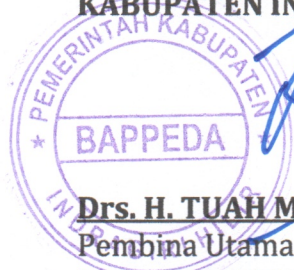
1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappeda pada dasarnya telah diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir ini berpedoman kepada RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
3. Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023;
4. Tata cara penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dengan diiringi peran aktif dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan disusunnya Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga sekaligus menjadi ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun anggaran 2023.

Tembilahan, September 2022

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002